



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal Februari 2025 tentang penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mendorong kepala daerah untuk melakukan pemangkasan anggaran pada berbagai pos belanja, termasuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, honorarium, dan belanja pendukung yang tidak terukur. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan pada Tahun 2025; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra ditetapkan, dan keadaan darurat

atau keadaan luar biasa yang memaksa Pemerintah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Sesuai amanat tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025 pada Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2025.

1.4.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sampai dengan
Triwulan I dan Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

2.3 Review terhadap Renja Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2025, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan I Tahun Anggaran 2025.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) hingga Triwulan I dengan seksama. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Inspektorat Daerah, serta untuk memastikan bahwa arah strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat Daerah masih sesuai dan relevan.

Dalam proses evaluasi ini, Inspektorat Daerah mengumpulkan data terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama triwulan pertama tahun 2025. Data ini mencakup indikator kinerja, anggaran yang telah digunakan, serta kendala atau hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Renja.

Selain itu, evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja, seperti keterbatasan anggaran, serta perubahan kondisi eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, Inspektorat Daerah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan kelancaran pelaksanaan Renja ke depannya.

Hasil capaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Inspektorat Daerah
s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2024- 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024				Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp Renja	K	DPA INDUK Rp	K	Rp	K	%	
(1) Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0.17					0.17				N/A		N/A		Persentase kenaikan Nilai IEPK dapat dihitung ketika nilai IEPK telah dikeluarkan pada Laporan Penjaminan Kualitas oleh BPKP di akhir tahun
(2) Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai IEPK	Nilai	2.925					2.915		2.920		N/A		N/A		Nilai IEPK akan dikeluarkan pada Laporan Penjaminan Kualitas oleh BPKP di akhir tahun
									3.084.861.000		3.084.861.000		123.401.166		3.99	
(3) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	%	1	0				1				0		200		Belum terdapat Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa pada triwulan I.
			30	66.67				30		30		N/A		N/A		Persentase Peningkatan Temuan Ketidakepatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD masih menggunakan data tahun lalu karena hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024 belum tersedia.

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2024- 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024				Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK	K	Rp	K	%					
		%	57		75.73		96		55		70	33.33		47.61		Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan APiP yang diselesaikan per 27 Maret 2025 adalah 14 dari 42		
		%	95						94		96		95		98.96		Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut BPK RI per 27 Maret 2025 (891/934)x100	
[4] Penyelenggaraan Pengawasan Internal										3.000.619.000				110.503.916		3.67		
	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Buah	2100		887			700			700	891			127.29		Jumlah rekomendasi per 27 Maret 2025 karena hasil pemutakhiran semester II keluar pada semester I tahun 2025	
	Jumlah rekomendasi pengawasan APiP yang ditindaklanjuti	Buah	450		156			150			150	14			9.33		Jumlah Rekomendasi Pengawasan APiP per 27 Maret 2025 adalah 14	
	Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	%	95		100			95			95	20.45			21.53		PKPT berbasis risiko tahun 2025 berjumlah 220 penugasan, realisasi Jan-Mar berjumlah 45 penugasan.	
[5] Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										393.279.000				58.820.250		14.96		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	12		5			4				2			50		1. LHP Audit kinerja UKPBI; 2. LHP Optimalisasi pengelolaan pajak.	
[5] Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										706.130.000				22.850.000		3.24		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56		56			56			56	0			0		Pengawasan Keuangan yang dilakukan berupa Stock Opname untuk 56 OPD yang akan dilaksanakan di akhir tahun.	
[5] Reviu Laporan Kinerja										121.080.000								
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	6		2			2			2	1			50		1. LHP Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Kabupaten Banyumas Tahun 2024	
[5] Reviu Laporan Keuangan										22.680.000								

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2024- 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024				Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDIK	K	Rp	K	%			
[5] Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1		1		1		1						100		LHP LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024	
											813.600.000			12.405.000		1.52		
[5] Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	93		31		31		31						0		Per 27 Maret 2025 belum ada pengawasan desa yang dilakukan.	
											30.180.000			300.000		0.99		
[5] Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	9		3		3		3						100		Kesepakatan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan	
											913.670.000			16.128.666		1.76		
[4] Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	42		14		14		14						21.43		Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebanyak 3 per 27 Maret 2025 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI belum ada karena belum dilaksanakan pemutakhiran tindak lanjut LHP BPK RI. pemutakhiran dilaksanakan pada bulan Juni oleh Tim BPK RI	
																15.3		

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDIK	K	Rp	K	
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi	%	100		100		100		100		100		Jumlah Aduan per 27 Maret 2024 sebanyak 10 dan telah terselesaikan 10 berdasarkan Lapak Aduan Banyumas dengan rincian: 1. Audit/Sidak untuk setoran PBB di desa Tambaknegara 2. Cindaga anggaran paling besar, puluhan tahun jalan tidak pernah diaspal, mohon untuk di cek kades Cindaga 3. Pengawasan setiap Dinas Pemerintah terkait Anggaran 4. Banyak bangunan yang belum lama namun sudah rusak, di cek anggarnya 5. Tindak OTT dan audit untuk tiap instansi yang melakukan penyelewengan 6. Kecurangan di desa Binangun 7. Kepastian tentang oknum ke dua perangkat desa Binangun yang jelas menyalahgunakan kewenangan jabatan 8. Bagaimana situasi perkembangan permasalahan di desa Binangun terkait audit ketahanan pangan 9. Audit anggaran di desa Banyumas 10. Usul agar dana desa di semua desa di Sumbang di sidak
	Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	%	95		100		95		95		31.71	33.38	Jumlah penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori tahun 2025 adalah sebanyak 45, realisasi Jan-Mar sebanyak 13 penugasan.
[5] Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							54.392.000	54.392.000		9.593.250		17.63	
	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	3		1		1		1		100		Laporan Penghitungan Kerugian Daerah Bumdesma Jatilawang

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasa ran/ Program/Ke giatan		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDIK	K	Rp	K	%			
[5] Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								29.850.000		29.850.000		3.304.000		11.07		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	168		58		56				3		5.36			1. Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu PUTT Dinkamnak; 2. Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Desa Kedungwringin; 3. Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Desa Kranggan.
[3] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								9.368.124.200		9.368.124.200		287.001.976		3.08		
	Level Kapabilitas APIP	level	3		3		2		3		N/A		N/A			Nilai Kapabilitas APIP akan dikeluarkan pada Laporan Penjaminan Kualitas oleh BPKP di akhir tahun
	Persentase desa berisiko tinggi	%	5		9.97		10		7		N/A		N/A			Data Desa berisiko tinggi masih disusun oleh masing-masing Irban.
	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B	%	52		N/A		50		51		N/A		N/A			Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) sudah tidak lagi dilakukan oleh semua Perangkat Daerah. Penilaian RB mulai tahun 2023 berupa tematik dan hanya ada pada level Kabupaten bukan Perangkat Daerah sehingga tidak ada nilai RB untuk setiap Perangkat Daerah seperti tahun 2022 dan sebelumnya.
[4] Pendampingan dan Asistensi								8.761.276.000		8.761.276.000		287.001.976		3.27		
	Persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	10		35		10		10		1.99		19.9			Pendampingan dan asistensi dilakukan terhadap 6 desa dari 301 desa yang terseleksi berdasarkan penilaian risiko per 27 Maret 2025.

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	100		100		100		100		100		100		Pendampingan dan asistensi kepada 56 Perangkat Daerah terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Fraud Risk Assessment (FRA)
[5] Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							1.377.700.000				33.561.000			2.44	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	168		56		56				0		0		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah belum dilaksanakan di Triwulan I.
[5] Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							4.561.855.000				176.891.800			3.87	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	168		1		56		56		0		0		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi belum dilakukan pada triwulan I.
[5] Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							1.660.143.000				18.117.000			1.1	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12		6		4		4		2		50		1. Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi (MCP KPK) 2. Launching Hasil SPI KPK Tahun 2024
[5] Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas							1.161.578.000				58.432.176			5.03	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024			Tujuan/Sasa ran/ Program/Ke giatan			Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK	K	Rp	K	%	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	165		55		55		55			4		7.27		1. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada RSUD Banyumas 2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada RSUD Ajibarang 3. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada DPMPTSP 4. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada Dindukcapil
[4] Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										606.848.200	606.848.200					
	Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan	level	2		3		2		3			N/A		N/A		Nilai Kapabilitas APIP akan dikeluarkan pada Laporan Penjaminan Kualitas oleh BPKP di akhir tahun
	Level komponen dukungan pengawasan	level	2		3		2		3			N/A		N/A		Nilai Kapabilitas APIP akan dikeluarkan pada Laporan Penjaminan Kualitas oleh BPKP di akhir tahun
[5] Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										580.894.000	580.894.000					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3		1		1		1			0		0		Belum ada rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun.
[5] Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										25.954.200	25.954.200					
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3		1		1		1			0		0		Belum ada rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun.

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasa ran/ Program/Ke giatan		K		Rp Renja		DPA INDUK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									21.782.573.741		21.782.573.741		4.114.455.526		18.77		
	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100		100		100				100		16.42		16.42		Persentase diambil dari aplikasi SIPD program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									217.675.000				600.000			0.28	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3		4		3				3		2		66.67		L.KJIP Inspektorat Daerah Kab. Banyumas Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Tahun 2025
[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									111.552.000								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		2		2				2		1		50		Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Inspektorat Daerah Kab. Banyumas Tahun 2025
[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									106.123.000				600.000			0.57	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		1		1				1				100		L.KJIP Inspektorat Daerah Kab. Banyumas Tahun 2024
[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									13.452.096.947				3.813.589.498			28.33	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5		5		5				5				20		1. Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Banyumas Tahun 2024
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									13.382.736.947				3.804.129.498			28.41	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasa ran/ Program/Ke giatan		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		K	Rp	K	%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	78		79		79		78		80		102.56		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan sebanyak 79 PNS dan 1 PPPK
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														13.64	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7		7		7		7		7		100		1. SK Penetapan Pengguna Anggaran 2. Kuasa Pengguna Anggaran 3. Pejabat Pembuat Komitmen 4. Pejabat Pengelola Keuangan 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6. Pejabat Pengadaan 7. Pengurus Barang
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah														7.58	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	2		2		2		2		0		0		Laporan Rekon BMD dilaksanakan per semester sehingga akan terrealisasi pada Triwulan II
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														2.46	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		4		4		4		1		25		1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														19.75	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		4		4		4		3		75		1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														28.33	

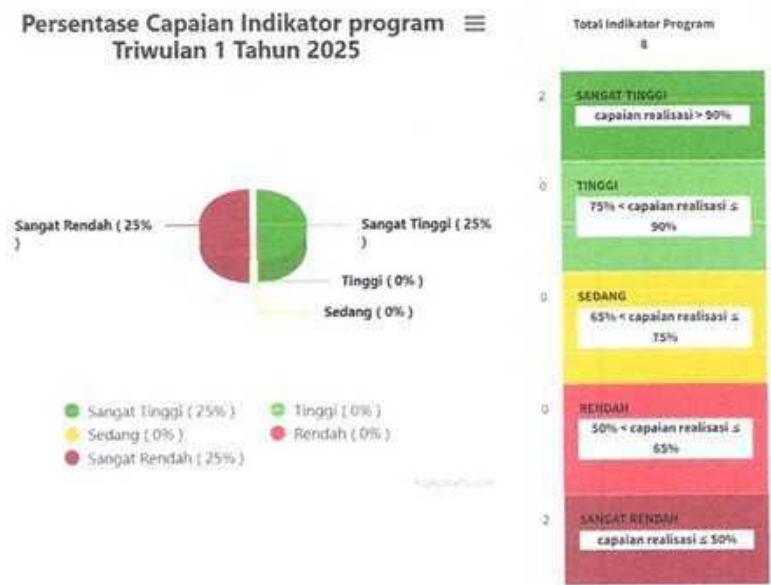
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasa ran/ Program/Ke giatan		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK	K	Rp	K	%	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		5		5			1		20		1. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7		7		7	125.359.500	125.359.500	4	11.130.996	57.14	8.88	1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2. Belanja Nutura dan Pakan- Natura 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
[5] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2		2		2	33.767.000	33.767.000	1	5.729.200	50	16.96	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30		31		30	1.463.016.000	1.463.016.000		82.387.634		5.64	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Desk SPM Irbab 3 2. Entry meeting BPKP 3. Entry meeting BPK 4. Rapat Audit Kinerja 5. Sosialisasi Desa Anti Korupsi Kalibagor 6. Sosialisasi Desa Anti Korupsi Kedungbunteng 7. Sosialisasi Sekolah Berintegritas dan Pendidikan Anti Korupsi
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500		557		500	52.045.500	52.045.500	271		54.2		Surat keluar sampai dengan 27 Maret 2025 sebanyak 271 berdasarkan aplikasi Srikandi..

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK	K	Rp	K	%		
[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.154.040.000		1.154.040.000		29.000.000		2.51		
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2		2			2				0			Belum terdapat realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
[5] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									1.129.040.000		29.000.000		2.57		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4		4			4				0			Belum terdapat pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada triwulan 1
[5] Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									25.000.000						
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2		2			2				0			Belum terdapat Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									635.378.800		85.546.591		13.49		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2		2			2				50			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									178.217.600		39.713.474		22.28		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5		5			5				100			1. Belanja Tagihan Telepon 2. Belanja Tagihan Air 3. Belanja Tagihan Listrik 4. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan		K	Rp	K	Rp Renja	K	DPA INDUK		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	%	
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										457.161.200			457.161.200		45.833.117		10.03	
[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8		8				8	4.455.234.000			4.455.234.000		44.296.033	100	1.01	Dokumen Perjanjian Kerja Pegawai Non PNS (8 orang)
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3		3			3	3							33.33		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										980.547.000			980.547.000		38.871.733		3.97	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31		31			31	31					6		19.35		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Motor : 2 unit Mobil : 4 unit
[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										80.480.000			80.480.000		4.457.000		5.53	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		20			20	20					6		30		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Komputer : 1 unit Laptop : 3 unit Printer : 2 unit
[5] Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										3.394.207.000			3.394.207.000		967.300		0.03	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024		Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1			Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		3		2				2		1		50	1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Sampai dengan Triwulan I tahun 2025, Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran masih belum dapat disajikan, karena Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi belum dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Sedangkan untuk Indikator Program, masih terdapat indikator yang belum dapat diperoleh, antara lain: Level Kapabilitas APIP, Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B, Persentase desa berisiko tinggi, Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD.

Sementara untuk Indikator Program yang sudah dapat diketahui adalah:

1. Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (47,61% / Sangat Rendah)
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan (98,96%)
3. Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (200% / Sangat Tinggi – Indikator Negatif)
4. Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah (16,42% / Sangat Rendah)

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

- b. Terbatasnya SDM dan anggaran pengawasan sehingga belum dapat menjangkau seluruh obyek pengawasan;
- c. Belum semua OPD menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.1. Tingkat kinerja Inspektorat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat dari terwujudnya APIP yang efektif. Untuk mewujudkan peran tersebut, APIP melakukan suatu aktivitas pengawasan berupa peran dan layanan yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah. Dalam memberikan peran dan layanan, APIP membutuhkan suatu dukungan pengawasan berupa pengelolaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, adanya praktik-praktik profesional, budaya dan hubungan organisasi yang dijalinnya, serta didukung dengan struktur tata kelola, dan akuntabilitas manajemen kinerja. Dukungan pengawasan yang handal diharapkan dapat membantu APIP melaksanakan aktivitas pengawasan secara efektif sehingga kualitas pengawasan yang dihasilkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

2.2.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

Dari isu-isu strategis dan gambaran kinerja pelayanan di atas, maka APIP sebagai suatu organisasi perlu didukung dengan struktur tata kelola seperti ketersediaan pendanaan/anggaran dalam melakukan aktivitas pengawasan, akses penuh terhadap informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan hubungan pelaporan formal atas kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Proses-proses tersebut perlu dituangkan ke dalam akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP seperti rencana kerja anggaran APIP, sistem pengelolaan anggaran secara ekonomis dan efisien, Sistem pengukuran kinerja dan pelaporan manajemen APIP terhadap organisasi. Terkait dengan hal tersebut, hal yang menjadi hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah terkait dengan ketersediaan pendanaan/anggaran dan SDM dalam melakukan aktivitas pengawasan.

2.2.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan landasan yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. RPD merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, dan program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut di atas, telah teridentifikasi isu penting dan permasalahan seperti telah di bahas pada Sub Bab sebelumnya. Antisipasi terhadap isu penting dan permasalahan tersebut akan berdampak terhadap keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya mengenai:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan isu penting, permasalahan, dan dampak program dan kegiatan Inspektorat Daerah terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peluang besar untuk meningkatkan peranannya dalam pengawasan pemerintahan.

Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengacu pada:

a. *Strengths* (Kekuatan)

1. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang cukup memadai. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, Jabatan Fungsional yang sebelumnya berada di bawah Inspektur, saat ini telah berada di bawah Inspektur Pembantu. Hal ini menyederhanakan birokrasi dan mempercepat koordinasi.
2. Cakupan tugas dan fungsi yang luas di antaranya adalah tugas dan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi, review, dan pemantauan, serta asistensi dan pendampingan;
3. Inspektur Daerah dapat melakukan pemeriksaan tanpa disposisi dari Bupati sehingga penanganan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih cepat;
4. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas Inspektorat Daerah yang ditangani secara khusus sehingga dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

1. Pemanfaatan hasil pengawasan belum optimal;

2. Pengendalian intern oleh OPD belum optimal.
3. Masih belum tersedianya APIP dengan keahlian khusus (Misal : Sarjana Teknik Sipil)

c. *Opportunities* (Peluang)

1. Koordinasi dan dukungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terjalin dengan baik;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan dan penganggarannya;
3. Dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan.

d. *Threats* (Ancaman)

1. Intervensi dalam kegiatan pengawasan;
2. Perubahan kebijakan Pemerintah dan lambatnya pembuatan petunjuk teknis.

2.2.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Inspektorat sebagai berikut:

Strategi 1: Memanfaatkan peluang dan kekuatan

Optimalisasi kegiatan pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta dukungan dari para pemangku kepentingan.

Strategi 2: Meminimalkan kelemahan dan ancaman

Memenuhi jumlah SDM dengan pengusulan penambahan SDM baik melalui pengadaan CPNS dengan keahlian khusus maupun inpassing, serta optimalisasi pengendalian intern dengan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan maupun pendampingan, serta minimalisasi intervensi pada kegiatan pengawasan.

2.3. Review terhadap Rencana Kerja (Renja) 2025

Penelaahan terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah yang tercantum di dalam Renja 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada garis sejajar untuk memudahkan analisis;

4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Inspektorat Daerah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2025.
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah hasil review terhadap Renja 2025 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Kode			Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
							Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	TUJUAN	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	0	0,33%			
			Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	SASARAN	Nilai IEPK	3	3,01			
6	01	01	Meningkatnya kinerja Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	100 %	21.782.573.741,00	100 %	20.136.087.572,00
6	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	217.675.000,00	3 Dokumen	217.675.000,00
6	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	111.552.000,00	2 Dokumen	92.803.500,00
6	01	01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	106.123.000,00	1 Laporan	103.738.000,00
6	01	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	13.452.096.947,00	5 Laporan	13.452.096.947,00
6	01	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	78 Orang/bulan	13.382.736.947,00	78 Orang/bulan	13.382.736.947,00
6	01	01		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	7 Dokumen	69.360.000,00	7 Dokumen	67.980.000,00

Kode				Tujuan / Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kebutuhan Perubahan	
								Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target	Tahun 2025	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.868.148.994,00	2 Laporan	Pagu Indikatif (Rp)	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.162.000,00	4 Paket	2.292.000,00	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	121.268.966,00	4 Paket	86.264.013,00	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	63.530.028,00	5 Paket	36.069.828,00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	125.359.500,00	7 Paket	62.313.500,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33.767.000,00	2 Paket	23.900.000,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	30 Laporan	1.463.016.000,00	30 Laporan	1.115.748.900,00	
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	557 Dokumen	500 Dokumen	52.045.500,00	500 Dokumen	39.837.000,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.154.040.000,00	2 Laporan	1.154.040.000,00	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	4 Unit	1.129.040.000,00	4 Unit	83.000.000,00	

Kode				Tujuan / Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025			Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
								Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target		Pagu Indikatif (Rp)
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	107 Unit	2 Unit	25.000.000,00	2 Unit		0,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	635.378.800,00	2 Laporan		635.378.800,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	178.217.600,00	5 Laporan		178.217.600,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	457.161.200,00	8 Laporan		457.161.200,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	3 Laporan	4.455.234.000,00	3 Laporan		4.455.234.000,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	38 Unit	31 Unit	980.547.000,00	31 Unit		980.547.000,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	20 Unit	80.480.000,00	20 Unit		29.271.084,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	3.394.207.000,00	2 Unit		3.394.207.000,00

Kode				Tujuan / Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025			Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	
6	01	02						Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	0 % 45 % 137,69 % 102,13 %	0 % 1 % 70 % 96 %	3.084.861.000,00	1 % 60 % 76 % 96 %		2.065.681.950,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	156 Buah 887 Buah 100 %	150 Buah 700 Buah 95 %	3.000.619.000,00	150 Buah 700 Buah 95 %		3.000.619.000,00
6	01	02	2.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	4 Laporan	393.279.000,00	4 Laporan		206.011.650,00
6	01	02	2.01		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	56 Laporan	706.130.000,00	56 Laporan		477.766.200,00
6	01	02	2.01		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	121.080.000,00	2 Laporan		30.270.000,00
6	01	02	2.01		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	22.680.000,00	1 Laporan		5.670.000,00
6	01	02	2.01		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	31 Laporan	31 Laporan	813.600.000,00	31 Laporan		572.175.000,00
								Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Kebutuhan Perubahan	

Kode				Tujuan / Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Tahun 2024	Target 2025		Tahun 2025	
6	01	02	2.01					0006	Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target
					Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	30.180.000,00	3 Kesepakatan	7.544.400,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	14 Dokumen		913.670.000,00	14 Dokumen	739.784.800,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	100 % 100 %	100 % 95 %	84.242.000,00	100 % 95 %	84.242.000,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	54.392.000,00	1 Laporan	18.997.400,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	58 Laporan	56 Laporan	29.850.000,00	56 Laporan	7.462.500,00
6	01	03			Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Asistensi serta Kapabilitas APUP	Level kapabilitas APUP Persentase desa berisiko tinggi Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B	3 9,97 % N/A	3 7 %	9.368.124.200,00	3 7 %	7.555.387.150,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan Level komponen dukungan pengawasan	3 Level	3 Level	606.848.200,00	3 Level	606.848.200,00
Kode				Tujuan / Sasaran			Realisasi Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025		Kebutuhan Perubahan Tahun 2025	

6	01	03	2.01	0001	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Target Induk 1 Rekomendasi	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									580.894.000,00	1 Rekomendasi	574.931.500,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0	1 Rekomendasi	25.954.200,00	1 Rekomendasi	6.488.550,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	35 % 100 %	10 % 100 %	8.761.276.000,00	10 % 100 %	8.761.276.000,00
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 perangkat daerah	56 perangkat daerah	1.377.700.000,00	56 perangkat daerah	1.200.986.400,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 perangkat daerah	56 perangkat daerah	4.561.855.000,00	1 perangkat daerah	3.795.935.000,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1.660.143.000,00	4 Kegiatan	1.076.100.500,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	1.161.578.000,00	55 perangkat daerah	900.945.200,00
					JUMLAH				34.235.558.941,00		29.757.156.672,00

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

INSPEKTORAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

Kode				Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Target		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah
							Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja P 2025				
				Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	TUJUAN	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	0,33%					Kab. Banyumas	APBD		✓
				Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	SASARAN	Nilai IEPK	3,01					Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01		Meningkatnya kinerja Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	100 %	11.870.339.800,00	21.782.573.741,00	20.136.087.572,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.01		Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	44.085.000,00	217.675.000,00	217.675.000,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	31.743.000,00	111.552.000,00	92.803.500,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	12.342.000,00	106.123.000,00	103.738.000,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	9.620.258.414,00	13.452.096.947,00	13.452.096.947,00	Kab. Banyumas	DAU		✓
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.558.098.414,00	13.382.736.947,00	13.382.736.947,00	Kab. Banyumas	APBD		✓

Kode				Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025				
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	7 Dokumen	62.160.000,00	69.360.000,00	67.980.000,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	893.242.606,00	1.868.148.994,00	1.868.148.994,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.361.000,00	9.162.000,00	2.292.000,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	111.598.278,00	121.268.966,00	86.264.013,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	49.463.628,00	63.530.028,00	36.069.828,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	145.324.500,00	125.359.500,00	62.313.500,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.242.000,00	33.767.000,00	23.900.000,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	497.943.200,00	1.463.016.000,00	1.115.748.900,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	39.310.000,00	52.045.500,00	39.837.000,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	352.416.500,00	1.154.040.000,00	1.154.040.000,00	Kab. Banyumas	APBD		√

Kode				Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Target		Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja P 2025				
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	342.416.500,00	1.129.040.000,00	83.000.000,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	407.177.280,00	635.378.800,00	635.378.800,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	142.916.400,00	178.217.600,00	178.217.600,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	264.260.880,00	457.161.200,00	457.161.200,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	3 Laporan	553.160.000,00	4.455.234.000,00	4.455.234.000,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	174.670.000,00	980.547.000,00	980.547.000,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	111.460.000,00	80.480.000,00	29.271.084,00	Kab. Banyumas	APBD		✓
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	267.030.000,00	3.394.207.000,00	3.394.207.000,00	Kab. Banyumas	APBD		✓

Kode				Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Target		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah
							Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja P 2025				
6	01	02		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	0 % 1 % 70 % 96 %	1 % 60 % 76 % 96 %	1.511.280.000,00	3.084.861.000,00	2.065.681.950,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	150 Buah 700 Buah 95 %	150 Buah 700 Buah 95 %	1.176.492.000,00	3.000.619.000,00	3.000.619.000,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	174.312.000,00	393.279.000,00	206.011.650,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	56 Laporan	256.950.000,00	706.130.000,00	477.766.200,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.01	0003	Revisi Laporan Kinerja	Revisi Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	207.540.000,00	121.080.000,00	30.270.000,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.01	0004	Revisi Laporan Keuangan	Revisi Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	46.440.000,00	22.680.000,00	5.670.000,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	31 Laporan	31 Laporan	229.500.000,00	813.600.000,00	572.175.000,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	54.000.000,00	30.180.000,00	7.544.400,00	Kab. Banyumas	APBD		V

Kode				Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Target		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah
									Sebelum	Sesudah	Renja 2025				
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APip	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APip	14 Dokumen	14 Dokumen	207.750.000,00	913.670.000,00	739.784.800,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Persentase penguasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	100 % 95 %	100 % 95 %	334.788.000,00	84.242.000,00	84.242.000,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	53.988.000,00	54.392.000,00	18.997.400,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	56 Laporan	56 Laporan	280.800.000,00	29.850.000,00	7.462.500,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	03			Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Asistensi serta Kapabilitas APip	PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Level kapabilitas APip Persentase desa berisiko tinggi Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B	3 7 %	3 7 %	1.231.462.200,00	9.368.124.200,00	7.555.387.150,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan Level komponen dukungan pengawasan	3 Level	3 Level	75.944.800,00	606.848.200,00	606.848.200,00	Kab. Banyumas	APBD		V
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	71.084.800,00	580.894.000,00	574.931.500,00	Kab. Banyumas	APBD		V

Kode				Tujuan/ Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Target		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah
							Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja P 2025				
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4.860.000,00	25.954.200,00	6.488.550,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	10 % 100 %	10 % 100 %	1.155.517.400,00	8.761.276.000,00	8.761.276.000,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 perangkat daerah	56 perangkat daerah	333.062.000,00	1.377.700.000,00	1.200.986.400,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	56 perangkat daerah	1 perangkat daerah	461.236.000,00	4.561.855.000,00	3.795.935.000,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	343.943.000,00	1.660.143.000,00	1.076.100.500,00	Kab. Banyumas	APBD		√
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	17.276.400,00	1.161.578.000,00	900.945.200,00	Kab. Banyumas	APBD		√
									14.613.082.000,00	34.235.558.941,00	29.757.156.672,00				
					JUMLAH										

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan pada Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pengawasan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, dan APBN;
2. Seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 secara efektif dan efisien;
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama sisa berjalan Tahun Anggaran 2025;
5. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas

Dibuat di Purwokerto

Pada tanggal, 30 Juni 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



Djoko Setyong, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
ID 1970022 199001 1 002

REGRISTER RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Penugasan yang tumpang tindih sehingga pendampingan dan asistensi tidak dapat dilakukan ke desa dengan optimal secara intensif dan berkala	Terdapat permintaan pemeriksaan mandatory dan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti meskipun tidak terjadwal dalam PKPT	Pendampingan ke desa tidak dapat dilakukan dengan optimal secara intensif dan berkala	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban, Pemeriksa	PPBR	KE	Kebijakan dan Prosedurn sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi PPBR sehingga terdapat spare waktu untuk penugasan mendadak	Irban Pemeriksa	Triwulan IV Tahun 2025
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Penugasan yang tumpang tindih sehingga pendampingan dan asistensi tidak dapat dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah secara intensif dan berkala	Terdapat permintaan pemeriksaan mandatory dan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti meskipun tidak terjadwal dalam PKPT	Terlambat menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan	Pemerintah Daerah; Inspektur Daerah; Irban; Pemeriksa;	Pemberian reward dan punishment terkait lama waktu pemeriksaan	KE	Kebijakan dan Prosedurn sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Perumusan kebijakan pemberian reward dan punishment yang lebih optimal	Irban Pemeriksa	Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	601	Persentase pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	Penugasan yang tumpang tindih sehingga terlambat menyelesaikan laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Terdapat permintaan pemeriksaan mandatory dan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti meskipun tidak terjadwal dalam PKPT serta pelaksanaan pengawasan atas permintaan oleh pihak eksternal tanpa melalui analisis yang memadai	Pendampingan tidak bisa dilakukan ke seluruh Perangkat Daerah secara intensif dan berkala	Pemerintah Daerah; Inspektur Daerah; Irban; Pemeriksa;	PPBR	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi PPBR sehingga terdapat spare waktu untuk penugasan mendadak	Irban pemeriksa	Triwulan IV Tahun 2025
4	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Persentase pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	Penugasan yang tumpang tindih sehingga terlambat menyelesaikan laporan hasil pengawasan internal	Terdapat permintaan pemeriksaan mandatory dan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti meskipun tidak terjadwal dalam PKPT	Terlambat menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan	Pemerintah Daerah; Inspektur Daerah; Irban; Pemeriksa;	PPBR	KE	Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan	Optimalisasi PPBR sehingga terdapat spare waktu untuk penugasan mendadak	Irban Pemeriksa	Triwulan IV Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Benturan kepentingan dengan pihak eksternal	Tekanan dari atasan, eksternal dan penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Sosialisasi aturan PBJ; Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Penyusunan skoring prioritas kegiatan; Pengusulan dan verifikasi proposal; Aplikasi e-Monitoring untuk DAK; Aplikasi SIPD; Pakta Integritas Pengadaan Barang/Jasa	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap, Optimalisasi SOP tata cara pengusulan kegiatan	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyusunan spesifikasi teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu	Tekanan dari atasan, eksternal dan penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Tim teknis pengadaan; Pengadaan melalui e-Purchasing; Dokumentasi formal hasil Reviu dari UKPBJ	KE	Kebijakan dan Prosedurnya sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan penyusunan spesifikasi dengan pembentukan tim teknis pengadaan	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025
7		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penggelembungan nilai harga pada HPS	Tekanan dari atasan, eksternal dan penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ	Dampak keuangan, hukum dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Tim teknis pengadaan; Pengadaan melalui e-Purchasing; Dokumentasi formal hasil Reviu dari UKPBJ	E		Melaksanakan pendampingan dan reviu manajemen risiko pada salah satu sasaran unggulan pemerintah daerah sebagai upaya awal perbaikan kualitas register risiko Pemda	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia	Tekanan dari atasan, eksternal dan penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Penilaian Kinerja Rekanan PBJ secara internal; Pengecekan di aplikasi SIKAP, Pakta Integritas	E		Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan	Tekanan dari atasan, eksternal dan penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Penilaian Kinerja Rekanan PBJ secara internal; Pengecekan di aplikasi SIKAP, Pakta Integritas	E		Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia	Tekanan dari atasan, eksternal dan penyalahgunaan wewenang sebagai pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Penilaian Kinerja Rekanan PBJ secara internal; Pengecekan di aplikasi SIKAP, Pakta Integritas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025
11		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan	Kelemahan Pengendalian, tekanan eksternal, tekanan ekonomi, dan penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Pakta integritas elektronik; Pengendalian PPK; Pemeriksaan hasil pekerjaan; Pengawasan dari konsultan pengawas/MK dan tim teknis; Kontrol	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi pengendalian PPK, menggunakan jasa konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan membentuk tim teknis	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								dokumen dari pemeriksaan lab					
12		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kolusi antara penyedia dan PPK	Kelemahan Pengendalian, tekanan eksternal, tekanan ekonomi, dan penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Pakta integritas elektronik; Pengendalian PPK; Pemeriksaan hasil pekerjaan; Pengawasan dari konsultan pengawas/MK dan tim teknis; Kontrol dokumen dari pemeriksaan lab	E		Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemberian suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan pengadaan	Kelemahan Pengendalian, tekanan eksternal, tekanan ekonomi, dan penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Pakta integritas elektronik	E		Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14		601	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PPK/Pokja/ Pejabat menerima gratifikasi	Kelemahan Pengendalian, tekanan eksternal, tekanan ekonomi, dan penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	Perpres PBJ dan Perlem LKPP; Pakta integritas elektronik	E		Penguatan integritas pada saat apei, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap,ppk membuat laporan ke UPG	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	601	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN	Tekanan ekonomi, peluang berbuat curang, intervensi dari luar, dan pembenaran	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Inspektorat Daerah; Masyarakat	PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	E		Pengawasan atau kontrol oleh atasan langsung	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Gratifikasi dari objek Pemeriksaan (auditi)	Kurangnya integritas Pejabat/Oknum APIP dan Pembenaan budaya ketimuran memberi hadiah	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	Perbup 45/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pakta Integritas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi kode etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai benturan kepentingan (Perbup 59/2017) secara bertahap	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Kurangnya kualitas register risiko Pemda sehingga PPBR belum mampu menghasilkan obyek audit yang paling berisiko untuk diaudit	Kurangnya pendampingan dan penjaminan kualitas atas manajemen risiko	Kesulitan dalam penentuan obyek audit kinerja dan jenis pengawasannya	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	SOP PPBR; Pedoman PPBR	TE	Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan	Melaksanakan pendampingan dan review manajemen risiko pada salah satu sasaran unggulan pemerintah daerah sebagai upaya awal perbaikan kualitas register risiko Pemda	Irban Pemeriksa	Triwulan I Tahun 2025
18	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Persentase pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	Tidak tersedianya dokumen yang menjadi obyek pengawasan internal yang disebabkan keterlambatan penyusunan dokumen oleh Pemda/PD/ Desa sehingga	Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara tim tindak lanjut dengan tim pemeriksa	PKPT tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	Permintaan dokumen awal oleh tim perencanaan ; Entry meeting oleh tim pemeriksa	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi secara intensif dengan Bappedalitbang terkait dengan jadwal perencanaan (EWS), sosialisasi PKPT	Irban Pemeriksa	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				PKPT tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal									
19	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	Perbedaan metode dan ruang lingkup antar tim pada jenis pengawasan yang sama	Kurangnya penyamaan persepsi dan diskusi antar Irban	Kurangnya kualitas hasil pengawasan internal	Pemerintah Daerah; Inspektorat Daerah;	Reviu berjenjang oleh Pengendali Teknis, Irban, Kasubag Analisis dan Evaluasi, serta Sekretaris	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan penyamaan persepsi pada tahap perencanaan , proses/ pelaksanaan dan penyusunan laporan/hasil pengawasan	Irban Pemeriksa	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Kurang intensifnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal	Aplikasi SIMHP hanya dapat diakses di kantor	Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal APIP	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	Belum Ada	TE	Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan pemantauan TL secara berkala oleh Tim TL yang melibatkan Tim Pemeriksa	Irban Pemeriksa, Sekretaris	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
21	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	601	Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	Tidak seluruh personil tim pemeriksa memahami sepenuhnya a perkara dugaan korupsi dalam audit investigasi dan/atau PKKN untuk dapat berkontribusi secara optimal	Kurangnya kemauan APIP untuk belajar hal baru yang rumit	Terhambatnya pelaksanaan audit investigasi dan/atau PKKN	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	Pembagian tugas dan tanggung jawab pengawasan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memastikan bahwa tim audit investigasi dan/atau PKKN terdiri dari SDM yang kompeten	Irban Pemeriksa	Triwulan I s.d. IV Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	601	Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	Pelaksanaan audit investigasi dan/atau PKKN menyita waktu dan energi pemeriksa	Kompleksitas dan kerumitan perkara dugaan korupsi	Terlambatnya penyelesaian audit investigasi dan/atau PKKN	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	SOP PKKN Ekspos oleh APH tentang kasus PKKN	TE	Kebijakan dan Prosedurn sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	penyusunan pedoman PKKN	Irban Pemeriksa	Triwulan I Tahun 2025
23	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	601	Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	Terdapat pengawasan sejenis yang dilakukan oleh pihak lain (Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP, APH)	Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait (Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP, APH)	Hasil pengawasan APIP tidak efektif dan efisien	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	Berkoordinasi dengan pihak terkait	E		Optimalisasi rapat koordinasi pengawasan daerah bersama pihak terkait	Inspektur Daerah	Triwulan IV Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	601	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan	Kurangnya integritas pegawai, tekanan ekonomi, rasionalisasi budaya, tekanan atasan, dan adanya peluang	Dampak keuangan, reputasi, hukum, kinerja, dan budaya	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	Perbup tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemkab Banyumas yang diterbitkan setiap tahun.	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel, antara lain melalui internalisasi Kode Etik ASN (Perbup 44/2017) dan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi (Perbup 51/2020)	Inspektur Daerah	Triwulan III Tahun 2025
25	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	601	Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan	Kurangnya kualitas peran dan layanan APIP dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah pada sektor prioritas	Paradigma lama/mindset bahwa PNS tidak perlu bekerja keras dan inovatif	Terhambatnya pelaksanaan Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pemerintah Daerah; Inspekturat Daerah;	FGD antara Inspekturat, Bappedalitbang dan OPD terkait dengan sasaran prioritas/unggulan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek terkait yang mendukung program prioritas	Inspektur Daerah	Triwulan IV Tahun 2025

No	Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	601	Jumlah rekomendasi pengawasan APJP yang ditindaklanjuti	Kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Kurangnya transparansi Perangkat Daerah terkait penggunaan anggaran dan keuangan	Meningkatnya potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah, Auditee, Inspektur Daerah, Irban Pemeriksa	Reviu LKPD, SIPD, rekon Keuangan triwulanan, ereviu RKA	KE	Kebijakan dan Prosedurn sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan keuangan sesuai PKPT	Inspektur Daerah	Triwulan II Tahun 2025